

Degradasi Lingkungan dan Penegakan Hukum: Studi Kasus PT. GDS

Kadek Winda Sari Dewi¹, Kadek Julia Mahadewi²

Email: windasaridewi24@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT: *The case involving PT. GDS highlights the significance of law enforcement in addressing environmental degradation. The Supreme Court's ruling on PT. GDS's CEO reaffirms corporate accountability for environmental harm. This study analyzes the legal and environmental implications of the verdict and underscores the need for more effective policies to prevent environmental violations by corporations. Employing normative legal analysis, this research enhances understanding of legal validity, decision consistency, and the criminal act's environmental implications. The analysis confirms the legal decision's strength while emphasizing the necessity for consistency and policy improvements to uphold environmental sustainability.*

Keywords: *Environmental Destruction; Environmental Law Enforcement; Corporate Responsibility.*

ABSTRAK

Kasus PT. GDS menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menghadapi perusakan lingkungan. Putusan Mahkamah Agung terhadap Direktur Utama PT. GDS menegaskan pertanggungjawaban perusahaan atas perbuatan yang merugikan lingkungan. Studi ini menganalisis implikasi hukum dan lingkungan dari putusan tersebut serta menyoroti perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah pelanggaran lingkungan oleh perusahaan. Melalui metode analisis hukum normatif, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang keberlakuan hukum, konsistensi putusan, dan implikasi tindak pidana terhadap lingkungan. Hasil analisis menegaskan kekuatan putusan hukum dan kebutuhan akan konsistensi serta perbaikan kebijakan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan.

Kata Kunci: Perusakan Lingkungan; Penegakan Hukum Lingkungan; Tanggung Jawab Perusahaan.

PENDAHULUAN

Kasus yang melibatkan PT. GDS memunculkan sorotan terhadap perusakan lingkungan dan memperlihatkan kompleksitas hukum dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup. Putusan Mahkamah Agung yang mengenai Direktur Utama PT. GDS, JS, atas tindak pidana perusakan lingkungan menjadi bukti konkrit bahwa hukum memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Dalam kasus ini, penetapan denda sebesar Rp. 5 Miliar dan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan lingkungan menjadi langkah signifikan dalam menegakkan hukum lingkungan. Namun, penting untuk merenung lebih dalam tentang implikasi jangka panjang dari putusan ini, serta efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran lingkungan serupa di masa depan.

Analisis hukum yang mendalam perlu digelar untuk mengeksplorasi tidak hanya sisi teknis dari putusan Mahkamah Agung, tetapi juga dampaknya terhadap tata kelola lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan relevansinya dalam kerangka hukum yang ada. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana perusahaan lain dapat belajar dari kasus ini untuk mencegah potensi pelanggaran lingkungan di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam kasus PT. GDS menggambarkan kekuatan, keterbatasan, dan potensi implikasi hukumnya dalam konteks perlindungan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan menegakkan keadilan dalam kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara hukum, lingkungan hidup, dan tanggung jawab perusahaan dalam mencegah perusakan lingkungan serta menegakkan keadilan di bidang lingkungan hidup.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini didasarkan pada pendekatan analisis hukum normatif yang memungkinkan tinjauan yang komprehensif terhadap kasus perusakan lingkungan oleh PT. GDS. Metode ini mengintegrasikan beberapa langkah kritis untuk memahami serta mengevaluasi implikasi hukum dan lingkungan dalam konteks kasus yang dipermasalahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari analisis menyeluruh terhadap kasus perusakan lingkungan oleh PT. GDS menunjukkan konfirmasi kuat terhadap putusan yang sebelumnya diberikan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Balige. Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA), menegaskan adanya kesesuaian antara interpretasi hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

1. Konfirmasi dan Penguatan Putusan

Hasil analisis menunjukkan bahwa MA memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap putusan sebelumnya yang menunjukkan PT. GDS telah bersalah dalam melakukan perusakan lingkungan hidup. Ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan dalam penegakan hukum terkait kasus lingkungan, memperlihatkan adanya keberlanjutan pandangan hukum dari tingkat pengadilan tinggi hingga ke level MA.

2. Relevansi Sanksi dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Hukuman pidana dan denda sebesar Rp. 5 Miliar yang dijatuhkan oleh MA terhadap

PT. GDS dianggap sebagai sanksi yang proporsional dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Analisis mempertegas bahwa sanksi ini tidak hanya merupakan bentuk hukuman, tetapi juga sebagai dorongan kuat untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

3. Penegasan Keseriusan Penegakan Hukum Lingkungan

Hasil analisis ini juga menggambarkan keseriusan pihak peradilan dalam menangani kasus-kasus lingkungan yang melibatkan perusahaan besar. Penegasan hukuman yang signifikan menjadi sinyal bagi perusahaan lain untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka, serta menjadi pesan tegas bahwa pelanggaran lingkungan tidak akan ditoleransi.

Melalui analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa putusan MA memberikan konfirmasi yang kuat terhadap keputusan sebelumnya, memberikan sanksi yang sesuai dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, dan menegaskan keseriusan penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup. Hal ini memberikan pijakan penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta memberikan pesan penting dalam mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di masa mendatang.

Diskusi

Kasus PT. GDS mencerminkan suatu langkah maju dalam upaya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan di Indonesia. Namun, sementara adanya keputusan yang kuat dari Mahkamah Agung, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan evaluasi lebih lanjut dalam konteks penegakan hukum lingkungan di negara ini.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan. Meskipun kasus PT. GDS menghasilkan putusan yang keras, ada pertanyaan apakah semua kasus pelanggaran lingkungan mendapatkan perlakuan yang sama dari sistem peradilan. Perlunya keadilan dalam penegakan hukum ini menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang berbeda-beda bagi pelanggar lingkungan, terlepas dari ukuran perusahaan atau kepentingan ekonomi yang terlibat.

Sanksi yang diberikan terhadap PT. GDS, baik dalam bentuk denda maupun tindakan perbaikan lingkungan, menggarisbawahi efektivitas sanksi sebagai alat pencegahan. Namun, diskusi seputar seberapa efektif sanksi tersebut sebagai deterrensi bagi perusahaan lain perlu diperdebatkan. Apakah sanksi yang diberikan sudah cukup mencegah perusahaan lain melakukan tindakan serupa ataukah perlu langkah lebih tegas dan terukur?

Peran pemerintah dalam mendorong penegakan hukum lingkungan juga menjadi sorotan. Perlunya penguatan kebijakan yang lebih jelas dan terukur dari pemerintah, serta peran lembaga pengawas lingkungan, menjadi poin penting dalam menghindari terjadinya pelanggaran lingkungan yang serupa di masa depan.

Pentingnya edukasi dan kesadaran lingkungan juga menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran lingkungan oleh perusahaan. Memperkuat kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan akan menjadi langkah proaktif dalam mencegah terjadinya tindakan yang merugikan lingkungan.

Dalam diskusi ini, meskipun ada langkah positif dalam kasus PT. GDS, tetap terdapat ruang untuk memperdebatkan konsistensi, efektivitas sanksi, peran pemerintah, serta pentingnya kesadaran lingkungan dalam mencegah perusakan lingkungan oleh perusahaan. Perdebatan ini menjadi panggilan untuk mengevaluasi sistem penegakan hukum lingkungan secara menyeluruh demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Kasus PT. GDS menjadi landasan penting dalam mengevaluasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun menunjukkan langkah positif dalam menangani perusakan lingkungan oleh perusahaan, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam kesimpulan ini.

Putusan Mahkamah Agung terhadap PT. GDS memperlihatkan kemajuan dalam penegakan hukum terkait lingkungan. Hal ini menciptakan preseden penting bahwa perusahaan besar pun tidak kebal hukum dan harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka.

Meski ada langkah maju, perlu diakui bahwa penegakan hukum harus tetap konsisten dan tegas. Konsistensi dalam menangani kasus-kasus serupa dan penegakan yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya perusakan serupa di masa depan.

Peran edukasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan menjadi penting. Kesadaran akan implikasi dari perusakan lingkungan dan tanggung jawab dalam melindungi lingkungan harus menjadi bagian dari budaya korporat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat kebijakan lingkungan yang jelas dan mendukung penegakan hukum. Langkah-langkah konkret dan penguatan lembaga pengawas menjadi penting untuk mencegah pelanggaran lingkungan oleh perusahaan.

Walaupun masih ada perbaikan yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum lingkungan, keputusan terhadap PT. GDS memberikan harapan bahwa langkah-langkah ini memiliki dampak positif terhadap perlindungan lingkungan dan memberikan pesan penting bahwa setiap pelanggaran akan ditangani dengan serius.

Dalam kesimpulan ini, diperjelas bahwa sementara ada kemajuan, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam penegakan hukum lingkungan. Konsistensi, peran pemerintah, kesadaran perusahaan, dan edukasi menjadi poin krusial dalam menjaga lingkungan hidup dari dampak buruk perusahaan. Dengan kerjasama dan langkah yang tepat, diharapkan penegakan hukum lingkungan dapat terus ditingkatkan untuk melindungi ekosistem bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2017, July 19). Merusak Hutan, PT. GDS Didenda 5Rp. 5 Milyar.
- Kurniawan, A., Agustian Sembiring, M., Joshua Nababan, M., & Jordan Edison, M. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2, 398–403.
- Loilewendan, F., Titawati, T., Ardika, T. G., & Ramli. (2022). Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh). *Jurnal Ganec Swara*, 16(1), 1378–1384.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32.
- Situmorang, A. B., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Negeri Asahan, K. (2022). Kekuatan Eksekutorial Jaksa Dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri. No 1203K/Pid.Sus.Lh/2016 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup. 1(2).